

# IMPLEMENTASI PENGAWASAN KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM UPAYA MENEKAN TUNGGAKAN KREDIT (Studi pada PT BPRS Amanah Sejahtera Gkb, Gresik-Jawa Timur Periode 2012-2014)

Surya Inggan Novembria  
Topowijono  
Dwiatmanto  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya  
Malang  
[suryaingganovembria@gmail.com](mailto:suryaingganovembria@gmail.com)

## ABSTRACT:

*This research aimed to find out the implementation of small and medium scale enterprise (SME) credit supervision and the efforts taken by PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-East Java to reduce debt. The research utilized a descriptive qualitative research framework. The focus of this research was supervision of Small- and Medium-Scale Enterprise (SME) credit in 2012-2014 and the credit efforts that were taken by PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-East Java. The results showed that PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-East Java in 2012-2014 has a debt with an NPF ratio that has surpassed the threshold of reasonableness, above 5%, and the company was deemed to be in an unhealthy state. This can be seen in the NPF ratios of 2012, 2013, and 2014, which were 7.7%, 8.8%, and 11.5%. The debt was caused due to the fault of the Account Officer in analyzing the ceiling value, bad depositor mentality, a decrease in depositor businesses, and a disaster. Credit supervision lacked because supervision was not performed routinely, and credit monitoring only consisted of withdrawal after a preliminary report. This research, rescheduling, restructuring, and even asset repossession need to be conducted. Routine scheduled physical checks, examination of period debtor financial records, and training of account officer abilities.*

**Keywords:** *Sharia Banking, Credit Supervision, Small and Medium-Scale Enterprises (SMEs), Non-Performing Financing (NPF)*

## ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan kredit usaha kecil dan menengah (UKM) dan mengetahui upaya dalam menekan tunggakan kredit yang dilakukan PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pengawasan kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada tahun 2012-2014 dan upaya menekan tunggakan kredit yang dilakukan PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur periode 2012-2014 memiliki tunggakan kredit dengan rasio NPF yang sudah melampaui batas kewajaran yaitu di atas 5% dan perusahaan dinyatakan dalam kondisi tidak sehat. Hal tersebut dapat terlihat dari rasio NPF pada tahun 2012, 2013, dan 2014 sebesar 7,7%, 8,8% dan 11,5%. Adanya tunggakan kredit disebabkan karena kesalahan *Account Officer* dalam menganalisis jumlah *plafond*, watak nasabah yang kurang baik, penurunan usaha nasabah, serta adanya musibah. Kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan yaitu Pengawasan tidak dilakukan secara rutin, *monitoring* perkreditan yang hanya melakukan penarikan atas laporan di awal. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan *Rescheduling*, *Restructuring* hingga penyitaan jaminan perlu dilakukan. Pengawasan fisik rutin yang dijadwalkan, melihat laporan keuangan debitur secara berkala, dan adanya pelatihan atas kemampuan dan ketelitian *Account Officer*.

**Kata kunci:** *Bank Syariah, Pengawasan Kredit, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Non performing financing (NPF)*

## A. PENDAHULUAN

Bagi perekonomian Indonesia Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran yang sangat penting karena Usaha Kecil dan Menengah (UKM) salah satu alternatif lapangan kerja baru yang tidak hanya untuk menunjang kesejahteraan sebagian warga negara tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat serta penggerak perekonomian nasional. Dilihat dari jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mengalami peningkatan. Tahun 2005 jumlah unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencapai 47,1 juta unit dengan proporsi 99,9 persen dari total unit usaha yang ada di Indonesia dan pada tahun 2006 jumlah unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencapai 48,9 juta unit. Peningkatan tersebut diimbangi dengan peningkatan pada jumlah tenaga kerja yang diserap. Pada tahun 2006, jumlah tenaga kerja yang diserap mencapai 83,2 juta jiwa dan mengalami peningkatan mencapai hingga 96,18 persen dari seluruh tenaga kerja di Indonesia (BPS, 2007).

Peran perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana sangatlah penting dalam menunjang kesejahteraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Lembaga perbankan memiliki fungsi *intermediaries* yaitu sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana yang berlebih (Karim, 2007:97). Salah satu layanan bank yang diberikan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah dalam bentuk pembiayaan/kredit. Kredit ini merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh perbankan dalam upaya menunjang kondisi keuangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pengertian kredit menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Fahmi dan Lavianti Hadi, 2009:2).

PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur adalah salah satu bank yang memiliki layanan kredit yang diperuntukkan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dapat digunakan sebagai sumber motivasi dalam membangun usahanya. Banyaknya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Gresik memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk dapat melakukan transaksi kredit di PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur. Beberapa

kemungkinan yang akan terjadi merupakan suatu risiko yang dihadapi PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur yaitu adanya kredit bermasalah, dimana kredit bermasalah terdiri dari Kredit Kurang Lancar, Diragukan dan Macet yang dapat mengakibatkan adanya tunggakan kredit.

Tunggakan kredit merupakan akibat dari adanya kredit bermasalah, jika tunggakan kredit tidak segera diatasi adanya kemungkinan risiko yang dihadapi bank dapat meningkat. Implementasi pengawasan kredit yang baik sangat diperlukan dalam menangani kredit bermasalah karena dengan adanya pengawasan kredit bank dapat diketahui berbagai kemungkinan yang terjadi sehingga adanya tunggakan kredit dapat diminimalisir. Tunggakan kredit suatu bank dapat dilihat dari kualitas aset yang dimiliki oleh bank. Kualitas aset bank dapat dihitung dengan menggunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*) untuk mengetahui tunggakan kredit yang dimiliki oleh bank. NPF (*Non Performing Financing*) sebagai salah satu indikator untuk mengukur kesehatan kualitas aset bank khususnya pada bank syariah. NPF dapat dihitung melalui rasio antara total dari pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan ([www.bi.go.id/id](http://www.bi.go.id/id)).

Tunggakan kredit yang berlebih dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan akan mempengaruhi besarnya NPF yang dimiliki PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa-Timur. Bank dapat dikatakan sehat, apabila bank memiliki rasio NPF tidak lebih atau sama dengan 5% seperti yang tertera pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Semakin tinggi rasio NPF yaitu lebih dari 5% menunjukkan kualitas kredit bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena sudah melampaui batas maksimum penyaluran dana. Naiknya tunggakan kredit dapat memicu adanya kenaikan pada nilai NPF. Kondisi kesehatan bank harus diwaspadai karena adanya kemungkinan NPF mengalami peningkatan dapat terjadi.

Peningkatan tunggakan kredit hingga rasio NPF yang dapat terjadi pada suatu bank, dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh bank, apakah sesuai dengan kebijakan perkreditan, prosedur pemberian kredit, dan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu adanya pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur sebagai tindakan pengendalian yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tunggakan yang timbul. Berdasarkan uraian di atas mengenai permasalahan yang ada, peneliti tertarik

dan mengangkat judul “**Implementasi Pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah dalam Upaya Menekan Tunggakan Kredit (Studi pada PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur Periode 2012-2014)**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan kredit usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan pada PT BPRS Amanah Sejahtera GKB Gresik-Jawa Timur dan mengetahui upaya pengawasan kredit usaha kecil dan menengah agar dapat menekan adanya tunggakan kredit pada PT BPRS Amanah Sejahtera GKB Gresik-Jawa Timur.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Bank Syariah**

#### **a. Pengertian Bank Syariah**

Berikut adalah beberapa pengertian bank syariah menurut para ahli (Wardiah, 2013:76): Menurut Suharjono, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam, menghindari praktik yang mengandung unsur riba. Sedangkan menurut Muhammad, bank syariah adalah (1) bank yang tidak mengandalkan bunga; (2) lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

#### **b. Ciri Bank Syariah**

Ciri-ciri Bank Syariah ini memiliki dimensi keadilan dan pemerataan karena adanya sistem bagi hasil yang dalam prinsip operasionalnya bersifat mandiri dengan tidak menggunakan bunga. Bank Syariah bersaing secara sehat dengan melihat keuntungan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah. Adanya dewan pengawas syariah sebagai pengawas, penasihat dan pemberi saran kepada direksi dan pimpinan yang berkaitan dengan aspek syariah juga merupakan ciri-ciri dari bank syariah. Beban biaya pada Bank Syariah disepakati bersama dengan melakukan tawar-menawar sesuai dengan batas waktu yang disepakati. Bank Syariah ini pengembangan utang juga harus dihindari dan pembiayaan proyek yang dilakukan tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang tetap. (Syarifuddin, 2012:54-57)

#### **c. Tujuan Bank Syariah**

Tujuan bank syariah adalah menyediakan lembaga keuangan perbankan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berhubungan dengan bank, membentuk masyarakat yang berfikir ekonomis, dan meningkatkan metode

bagi hasil pada Bank Syariah. (Wibowo, 2005:37)

#### **d. Kegiatan Usaha dan Produk-Produk Bank Syariah**

Kegiatan usaha dan produk-produk bank syariah meliputi, menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah, dan menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah. (Umam, 2009:53)

## **2. Kredit**

### **a. Pengertian Kredit**

Kredit adalah suatu kegiatan pinjam-meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang melakukan kesepakatan dan dalam pembayarannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. (Fahmi et.al, 2009:2)

### **b. Unsur-unsur Kredit**

Unsur-unsur kredit terdiri dari kepercayaan antara pihak bank dengan pemohon kredit, kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang berisi mengenai jangka waktu pengembalian pinjaman atas kegiatan kredit, risiko penyimpangan yang dilakukan oleh pemohon kredit, dan balas jasa yang didapat setelah melakukan kredit berupa keuntungan yang dikenal dengan nama bunga untuk bank konvensional, sedangkan keuntungan untuk bank yang berdasarkan pada prinsip syariah ditentukan dengan bagi hasil. (Kasmir, 2014:87):

### **c. Tujuan dan Fungsi Kredit**

Berdasarkan uraian tujuan dan fungsi kredit di atas, kesimpulannya kredit bertujuan mencari keuntungan demi kelangsungan hidup bank, membantu usaha nasabah dalam memperoleh dana perluasan usaha, dan memberikan keuntungan bagi pemerintah. Kredit memiliki beberapa fungsi yaitu untuk meningkatkan daya guna uang sebagai penghasil barang dan jasa, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, meningkatkan daya guna barang yang tidak berguna menjadi bermanfaat, sebagai alat stabilitas ekonomi karena membantu mengeksport barang dari dalam ke luar negeri, meningkatkan kegairahan usaha, meningkatkan pemerataan pendapatan jika kredit diberikan untuk pabrik yang membutuhkan banyak tenaga

kerja sehingga mengurangi pengangguran, dan meningkatkan hubungan internasional melalui pinjaman internasional. (Kasmir, 2014:88-89)

#### **d. Macam dan Jenis Kredit**

Macam dan jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, baik dari segi kegunaan dimana kredit digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan, dari segi tujuan kredit baik untuk peningkatan usaha, dikonsumsi sendiri atau untuk berdagang, dari segi jangka waktu dalam pengembalian kredit, dari segi jaminan yang diberikan, dan dari segi sektor usaha seperti, pertanian, peternakan, industri, pertambangan, pendidikan, profesi, perumahan, dan lainnya. (Kasmir, 2014:90-93)

#### **e. Jaminan Kredit**

Kegiatan kredit dapat dilakukan dengan jaminan dan tanpa jaminan yang digunakan untuk menutup kerugian yang akan ditanggung oleh bank jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pemohon kredit. Kredit dengan jaminan dapat menggunakan benda yang memiliki nilai dan dapat berupa orang sebagai penanggungjawab atas risiko yang didapatkan selama pelaksanaan kredit. Kredit tanpa jaminan dapat diberikan pada bank yang memiliki risiko terjadinya kemacetan yang relatif rendah. (Kasmir, 2014:93)

#### **f. Prinsip Pemberian Kredit**

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan suatu kredit pihak bank harus melihat kepribadian pemohon kredit (*character*), kemampuan pemohon kredit dalam mengembalikan kredit (*capacity*), modal (*capital*), jaminan yang diberikan jika pemohon kredit tidak dapat mengembalikan kredit (*collateral*), dan kondisi ekonomi pemohon kredit (*condition of economy*). (Rachmat et.al, 2009:83-85)

#### **g. Aspek-aspek dalam Penilaian Kredit**

Aspek aspek dalam penilaian kredit terdiri dari 7 aspek yakni, aspek manajemen, keuangan, pemasaran, teknis, amdal, yuridis, dan aspek sosial ekonomi. (Fahmi et.al, 2009:34)

#### **h. Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian kredit dilakukan dengan mengajukan berkas terlebih dahulu, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara I, *On The Spot*, wawancara II, mengambil keputusan, melakukan penandatanganan akad kredit, realisasi kredit, hingga melakukan salur/tarik dana. (Kasmir, 2014:100-103)

#### **i. Kolektibilitas Kredit**

Kolektibilitas kredit terbagi menjadi 5 jenis yaitu, kredit lancar (L), kredit dalam perhatian khusus (DPK), kredit kurang lancar (KL), kredit diragukan (D), dan kredit macet (M). (Sunarti, 2011:94-95)

#### **j. Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

Kredit Usaha Kecil dan Menengah merupakan kegiatan pinjam-meminjam yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah baik perorangan maupun badan usaha atau badan hukum tertentu pada kriteria Usaha Kecil dan Menengah.

### **3. Pengawasan Kredit**

#### **a. Pengertian Pengawasan Kredit**

Pengawasan kredit adalah suatu upaya yang dilakukan sebagai peringatan yang mampu mengantisipasi risiko berbagai penyimpangan terhadap kebijaksanaan kredit. Arthesa dan Handiman, (2006:181)

#### **b. Tujuan dan Fungsi Pengawasan Kredit**

Tujuan dari pengawasan kredit adalah agar pemberian kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian kredit, dan saling mempercayai antara bank dan debitur. Fungsi dari pengawasan kredit adalah melihat apakah pelaksanaan dalam menerapkan pengawasan kredit sesuai dengan kebijakan perkreditan bank, prosedur pemberian kredit, dan ketentuan lainnya. (Rachmat et.al, 2009:135)

#### **c. Macam-macam Pengawasan Kredit**

Terdapat 3 macam pengawasan kredit yakni, pengawasan aktif, pengawasan pasif, dan pengawasan kombinasi. Pengawasan kredit dapat dilakukan sebelum pemberian kredit dan setelah pemberian kredit diberikan. (Hasibuan, 2005:105)

#### **d. Teknik pengawasan kredit**

Informasi yang telah diperoleh baik dari pihak eksteren dan interen bank harus disatukan agar dapat mencari solusi dalam pemecahan masalah yang timbul akibat berjalannya pelaksanaan kredit sehingga dapat memudahkan memilih langkah apakah yang akan diambil dalam memecahkan masalah tersebut.

#### **e. Aspek-aspek Pengawasan Kredit**

Aspek-aspek pengawasan kredit pada dasarnya adalah adanya administrasi kredit yang memadai, nasabah yang menyampaikan laporan kredit secara berkala, kunjungan

kepada *Account Officer* ke tempat usaha debitur, adanya konsultasi terstruktur antara pihak bank dan debitur dalam mengatasi permasalahan kredit, adanya sistem yang digunakan untuk memperingatkan administrasi bank yang dikelola oleh *AO* untuk menangani apabila ada nasabah yang bermasalah. (Dendawijaya, 2009:79)

#### 4. Tunggakan Kredit

##### a. Pengertian Tunggakan Kredit

Tunggakan kredit merupakan akibat yang muncul dari pelaksanaan pemberian kredit bank kepada debitur yang dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo menurut perjanjian penerima kredit dalam pengembalian kreditnya mengalami permasalahan sehingga belum atau tidak dapat melakukan pembayaran atas kewajiban tersebut

##### b. Penyebab Timbulnya Tunggakan Kredit

Berbagai macam faktor penyebab timbulnya tunggakan kredit, dapat disimpulkan bahwa tunggakan kredit dapat terjadi dari pihak bank, pihak nasabah, dan faktor ekstern yaitu suatu peristiwa yang terjadi diluar kemampuan debitur dan kreditur selama pelaksanaan pengawasan kredit. (Kasmir, 2008:128)

##### c. Tindakan Penyelamatan Kredit Bermasalah

Tindakan penyelamatan yang dapat dilakukan dalam kredit bermasalah adalah dengan menggunakan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dari ketiga jenis tindakan penyelamatan kredit yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, serta penyitaan jaminan. (Kasmir, 2012:149)

##### d. NPF (*Non Performing Financing*)

NPF (*Non Performing Financing*) merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank khususnya pada bank syariah. Terdapat jenis kolektabilitas yang termasuk dalam tunggakan kredit adalah kolektabilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Menghitung besarnya NPF yang dimiliki oleh suatu bank, khususnya pada Bank syariah dapat menggunakan rumus:

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Total NPF (Pembiayaan Bermasalah)}}{\text{Total Pembiayaan yang diberikan}} \times 100\%$$

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat digunakan untuk menggambarkan mengenai kejadian/nyata pada suatu keadaan secara obyektif berdasarkan apa yang diteliti dan mampu memusatkan pada permasalahan yang ada pada obyek penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan tersebut. (Firdaus, 2012:163)

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini salah satu kegiatan yang penting. Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Nazir (2011:174)

#### a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkreditan seperti, pimpinan dan staff *AO* BPRS.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang diperlukan dalam pengumpulan data dengan mempelajari berbagai dokumen, laporan, dan catatan bank pada masa lalu yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian.

### 3. Instrumen Penelitian

#### a. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti, kertas daftar-daftar pertanyaan yang diajukan secara langsung.

#### b. Pedoman dokumentasi

Pedoman dokumentasi merupakan suatu bukti berupa pencatatan dengan menggunakan alat bantu seperti buku catatan terhadap dokumen-dokumen yang terdapat di bank.

### 4. Analisis Data

Tujuan dari analisis data adalah meringkas dan menyederhanakan data agar lebih berarti dan dapat diinterpretasikan sesuai jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang dimulai dengan mempelajari, dan mengevaluasi atau menelaah data yang sudah didapatkan serta dikumpulkan sebelumnya. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi pengawasan kredit usaha kecil dan menengah dalam upaya menekan tunggakan kredit pada PT BPRS Amanah Sejahtera GKB Gresik-Jawa Timur yang dimulai dari pengambilan fakta, dan peristiwa yang terjadi secara khusus dan sesuai

dengan topik penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan/kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur**

Prosedur Pemberian Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur dimulai dari adanya pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak nasabah kepada pihak bank. Pihak nasabah datang dan mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengambil formulir pengajuan permohonan pembiayaan pada *Customer Service*. Pihak nasabah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank dan kemudian menyerahkannya kembali kepada CS. CS menerima berkas permohonan pembiayaan dan memeriksa kelengkapan berkas serta melakukan penginputan data nasabah dan Sistem Informasi Debiturnya. Berkas yang sudah diperiksa akan diserahkan kepada *Account Officer* guna dilakukan pemeriksaan ulang.

Pihak AO yang sudah menerima akan segera memeriksa berkas permohonan pembiayaan dan mempelajari data tersebut yang digunakan untuk mempersiapkan *survey* tempat tinggal, tempat usaha yang dijalankan, serta jaminan pihak nasabah. Sebelum melakukan *survey* pihak AO melihat Sistem Informasi Debitur untuk mengetahui apakah nasabah memiliki pembiayaan/kredit lainnya. Pihak AO yang melakukan *survey* diharapkan dapat memberikan analisa pembiayaan dan usulan pembiayaan. Pihak AO memproses dan melaporkan hasil *survey* yang sekaligus analisa pembiayaan dan usulan pembiayaan kepada pihak Legal. Hal ini dilakukan pihak Legal untuk memeriksa berkas permohonan pembiayaan nasabah, aspek legalitas mulai dari persyaratan umum, laporan taksasi jaminan dan legalitas usahanya. Kemudian, berkas hasil *survey* yang sudah diperiksa bagian Legal akan diberikan kepada Kabag *Marketing* untuk dilakukan pengambilan keputusan.

Kabag *Marketing* yang sudah menerima berkas hasil *survey* dan analisa pembiayaan serta usulan pembiayaan akan langsung memproses berkas tersebut. Berkas tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan bagi Kabag *Marketing* untuk mengambil keputusan, apakah

permohonan pembiayaan nasabah tersebut akan diterima atau tidak, yang tidak luput dari peran Direksi dan Dewan Komisaris. Hasil dari keputusan yang sudah diambil tersebut akan dijadwalkan pencairan dan persiapan akadnya oleh Kabag *Marketing* yang dibantu oleh admin *Marketing* untuk menginformasikan kepada CS, Legal, dan Kabag Operasi serta berkas yang sudah diperiksa oleh Kabag *Marketing* diberikan kembali kepada Legal.

Keputusan yang diambil oleh Kabag *Marketing* dapat berupa penolakan atau penerimaan, jika adanya penolakan CS akan membuat surat penolakan permohonan pembiayaan yang nantinya akan diserahkan kepada nasabah saat pemanggilan nasabah dilakukan. Sebaliknya jika permohonan pembiayaan diterima, CS akan membuat surat penerimaan permohonan dan melakukan panggilan nasabah serta memberikan penjelasan mengenai prosedur pencairan dan mengarahkan nasabah untuk menuju ruang akad. Sebelum pelaksanaan akad, Legal mempersiapkan berbagai berkas permohonan pembiayaan nasabah yang sudah disetujui, dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akad lainnya. Setelah akad selesai dilakukan bagian Legal menyerahkan berkas permohonan pembiayaan yang sudah disetujui kepada nasabah guna melakukan pencairan dana pada bagian Teller.

Berdasarkan uraian tersebut, prosedur pengajuan pembiayaan yang diterapkan pada PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur dirasa sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari prosedur pembiayaan yang sistematis, namun meski di rasa cukup baik bank harus tetap menjaganya dan lebih ditingkatkan lagi kinerjanya, sehingga arus keluar masuknya transaksi dapat berjalan dengan baik serta dapat dilakukan secara maksimal.

##### **2. Pengawasan Pembiayaan/kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur**

Setelah adanya realisasi pembiayaan PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur melakukan pengawasan pembiayaan guna melihat apakah penggunaan pembiayaan digunakan sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Dilihat dari informasi berupa data yang diberikan PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur mengenai implementasi pengawasan pembiayaan belum dilakukan

dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari teknik pengawasan yang hasilnya, tunggakan yang terdapat pada PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur ini dalam kondisi yang tidak wajar yaitu melebihi batas maksimal sebesar 5%.

Implementasi pengawasan pembiayaan yang dilakukan PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur dikatakan kurang baik karena kurang maksimal. Implementasi pengawasan pembiayaan yang dilakukan seperti, pengawasan fisik rutin (*inspeksi On The Spot*), pengawasan fisik insidental (pemeriksaan mendadak), *monitoring* perkreditan, dan *verband controle*. Berikut adalah kekurangan yang terdapat pada pelaksanaan pengawasan pembiayaan pada PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur:

a. Pengawasan fisik rutin (*inspeksi On The Spot*) oleh pihak bank

Pengawasan fisik rutin (*inspeksi On The Spot*) yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah dilakukan untuk mengetahui apakah pembiayaan yang diberikan oleh bank benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan atau tidak. Pengawasan ini bertujuan untuk mengoreksi kembali penggunaan dana pembiayaan, memberikan bimbingan kepada nasabah mengenai administrasi dan manajemen usaha secara sederhana, serta melakukan kunjungan rutin untuk memantau perkembangan usaha nasabah. Kunjungan yang dilakukan pihak bank kepada nasabah dalam PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur tidak dilakukan secara rutin atau tidak terdapat waktu tertentu dalam melaksanakannya. Seharusnya pihak bank menjadwalkan adanya kunjungan kepada nasabah berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali secara rutin, tetapi pada PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur hanya melakukan kunjungan ketika nasabah sebagai debitur mengalami kemacetan pembayaran. Berdasarkan diberlakukannya kunjungan secara berkala diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tunggakan pembiayaan yang ada.

b. *Monitoring* Perkreditan

Tahap ini bank seharusnya melakukan pengawasan dengan melihat berbagai laporan yang dimiliki oleh debitur yang bertujuan untuk melihat perkembangan usaha yang dimiliki debitur, setelah adanya pembiayaan dari bank dan menilai apakah dengan kondisi

usahanya debitur dapat melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati pada akad. Hal ini tidak dilakukan oleh bank dikarenakan bank melakukan penarikan atas laporan diawal berupa laporan keuangan bank baik neraca, laporan L/R dan lainnya mengenai perkembangan usaha beberapa bulan sebelum adanya pembiayaan. Sebaiknya bank perlu meminta laporan keuangan debitur secara berkala minimal 3 bulan sekali agar dapat menilai apakah dengan kondisi usaha debitur tersebut, debitur memiliki kemampuan membayar dengan tepat atau tidak.

c. Kesalahan *Account Officer* dalam menganalisis *plafond* pembiayaan

Salah satu tugas *AO* adalah melakukan analisis mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah sampai dengan realisasi atau pencairan dana hingga dilakukannya pengawasan pembiayaan. Hal ini berpengaruh terhadap keputusan yang nantinya permohonan pembiayaan tersebut akan diterima dengan jumlah sesuai dengan yang diminta nasabah atau tidak. Analisis ini dapat dilakukan pada saat melakukan *survey* ke tempat usaha nasabah secara langsung serta melihat dari berkas-berkas yang diberikan pada saat pengajuan permohonan pembiayaan. Sebaiknya *AO* lebih teliti lagi dalam melakukan analisis sehingga keakuratan analisis dapat tercapai. Pemilihan seseorang yang menjadi *AO* haruslah memiliki kemampuan untuk memahami berbagai macam masalah yang ada dan keterampilan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Seorang *AO* perlu diberikan pelatihan karena tidak hanya memiliki kemampuan dan keterampilan, tetapi seorang *AO* harus mampu memberikan nasihat kepada nasabah agar terjadinya kemungkinan yang tidak diharapkan seperti adanya tunggakan pembiayaan jika dalam analisis *survey* yang dilakukan terdapat masalah yang diperkirakan dapat menimbulkan tunggakan.

### 3. Analisis Jumlah Tunggakan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur

Analisis Jumlah Tunggakan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur menggunakan *Non Performing*

*Financing* (NPF) yang merupakan rumus khusus bagi bank berprinsip syariah dan digunakan untuk mengetahui besar kecilnya rasio NPF yang dimiliki oleh PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur selama 3 periode yaitu pada 31 Desember 2012-31 Desember 2014. *Non Performing Financing* (NPF) dihitung berdasarkan total NPF (pembiayaan bermasalah) dengan total pembiayaan yang diberikan. Berikut tunggakan kredit yang terjadi pada PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur selama 3 periode, yaitu:

**Tabel 1. Laporan Jumlah Tunggakan Kredit Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Jumlah Kredit Yang Telah Diberikan PT BPRS Amanah Selama Periode 31 Desember 2012 s/d 31 Desember 2014**

Bulan	Total Tunggakan (Ribuan Rp)	Σ kredit yang diberikan untuk UKM (Ribuan Rp)	NPF (%)
Mar-12	1.830.865	38.804.751	
Jun-12	1.893.131	37.477.698	
Sep-12	2.989.832	36.489.008	
Des-12	4.688.819	34.648.958	
<b>Total</b>	<b>11.402.647</b>	<b>147.420.415</b>	<b>7,7</b>
Mar-13	4.026.427	35.657.027	
Jun-13	3.796.169	37.029.691	
Sep-13	3.527.187	37.517.021	
Des-13	1.870.389	39.975.934	
<b>Total</b>	<b>13.220.172</b>	<b>150.179.673</b>	<b>8,8</b>
Mar-14	3.000.462	44.363.043	
Jun-14	4.513.703	45.506.022	
Sep-14	5.512.728	32.983.393	
Des-14	4.774.773	31.926.210	
<b>Total</b>	<b>17.801.666</b>	<b>154.778.668</b>	<b>11,5</b>

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan laporan Tabel 1, total dari pembiayaan yang diberikan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) pada PT BPRS Amanah sejahtera GKB, Gresik-jawa Timur dapat dihitung dari jumlah keseluruhan pembiayaan yang diberikan dan tidak termasuk pembiayaan yang dialokasikan untuk usaha yang memiliki skala besar (penempatan pada bank lain seperti giro, tabungan, deposito dan pembiayaan mudharabah). Besar prosentase (%) tunggakan selama periode 31 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2014, yaitu:

- a) Rasio NPF tahun 2012  
 $= \frac{\text{Rp } 11.402.647}{\text{Rp } 147.420.415} \times 100\% = 7,7 \%$

- b) Rasio NPF tahun 2013  
 $= \frac{\text{Rp } 13.220.172}{\text{Rp } 150.179.673} \times 100\% = 8,8 \%$   
 c) Rasio NPF tahun 2014  
 $= \frac{\text{Rp } 17.801.666}{\text{Rp } 154.778.668} \times 100\% = 11,5 \%$

Dilihat berdasarkan Tabel di atas dari hasil analisis perhitungan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tidak hanya peningkatan pada jumlah pembiayaan yang diberikan saja yang mengalami peningkatan tetapi juga terjadi peningkatan pada tunggakan pembiayaan yang dialami oleh bank. Kedua hal ini dapat mempengaruhi besar prosentase NPF (*Non Performing Financing*) yang dapat dilihat dari setiap tahunnya. Terbukti dimulai pada tahun 2012 jumlah pembiayaan yang diberikan berjumlah Rp147.420.415 dan memiliki tunggakan pembiayaan berjumlah Rp11.402.647 menimbulkan NPF sebesar 7,7 %.

Di tahun 2013 terjadi peningkatan yang diketahui memiliki jumlah pembiayaan yang diberikan berjumlah Rp150.179.673 dan peningkatan tunggakan pembiayaan menjadi Rp13.220.172 dan menyebabkan peningkatan juga terhadap besarnya NPF sebesar 8,8 %. Sedangkan ditahun 2014 jumlah pembiayaan yang diberikan berjumlah Rp154.778.668 dan memiliki tunggakan pembiayaan berjumlah Rp17.801.666 dengan memiliki NPF sebesar 11,5%, kenaikan NPF ini dapat memicu adanya kemungkinan-kemungkinan naiknya NPF dapat terjadi pada periode selanjutnya.

Berdasarkan hasil analisis tersebut besarnya NPF yang dimiliki PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik Jawa-Timur sudah melebihi batas kewajaran yaitu lebih dari 5% dan dalam keadaan tidak sehat. bank dapat dikatakan sehat, apabila bank memiliki rasio NPF tidak lebih atau sama dengan 5%, sehingga perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur sebagai tindakan pengendalian yang diharapkan dapat meminimalisir tunggakan kredit yang timbul sehingga dapat memperkecil besar prosentase NPF mulai dari atau sama dengan 5% sampai dengan 0% dan bank dapat dikatakan dalam keadaan sehat.



#### 4. Faktor-faktor Penyebab Tunggakan Pembiayaan/kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Pembiayaan bermasalah dapat menyebabkan adanya tunggakan pembiayaan. Penyebab tunggakan pembiayaan dapat berasal dari beberapa faktor yaitu faktor internal pihak bank dan eksternal. Berikut adalah beberapa penyebab adanya tunggakan pembiayaan pada PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa-Timur:

##### a. Faktor Internal

Adanya kesalahan yang dilakukan oleh *Account Officer* dalam menganalisis karena kurangnya ketelitian dalam menentukan *plafond* pembiayaan yang diberikan sehingga analisis kurang akurat. Hal ini didukung dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Huda selaku Kepala Cabang PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur, yang menyatakan: “Kalau dari faktor internal biasanya terdapat kesalahan dari analisa dalam menentukan *plafond* pembiayaan yang seharusnya nasabah mendapatkan *plafond* sekian yang diperlukan tetapi *AO* mengajukannya lebih besar”. Berdasarkan uraian di atas, kesalahan *AO* memberikan jumlah *plafond* yang tidak sesuai dengan pengajuan permohonan pembiayaan dan kondisi dari pihak nasabah.

##### b. Faktor eksternal

Berikut adalah kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Huda selaku Kepala Cabang PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur, yang menyatakan: “Kalau dari eksternal terdapat beberapa nasabah tidak menggunakan semua pembiayaan yang diberikan sebagai modal kerjanya, tetapi digunakan untuk pemenuhan gaya hidup dan nafsu belanja, usaha nasabah lagi menurun dapat dicontohkan pedagang musiman yang ramai pada saat tertentu, kemudian bisa saja nasabah mengalami musibah seperti terkena bencana alam, dan kebakaran yang hal ini tidak dapat diduga oleh manusia karena kehendak yang kuasa. Ketiga hal ini dapat mempengaruhi nasabah bagaimana nasabah bisa mengembalikan angsurannya”. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor eksternal yang menyebabkan adanya tunggakan kredit, yaitu:

1) Watak nasabah yang dirasa kurang baik. Pembiayaan yang diberikan kepada

nasabah tidak seluruhnya digunakan sesuai dengan tujuannya sebagai modal kerja tetapi untuk kepentingan lain seperti pemenuhan gaya hidup dan nafsu belanja nasabah. Hal ini dapat memicu nasabah tidak dapat mengembalikan atau melakukan pembayaran dengan baik.

- 2) Penurunan usaha yang dialami debitur. Seperti halnya pedagang musiman yang ramai pada waktu tertentu, hal ini akan mempengaruhi penurunan penghasilan atau pendapatan dari usaha debitur sehingga berakibat terjadinya tunggakan pembiayaan.
- 3) Musibah yang dialami oleh debitur. Suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya. Hal ini membuat debitur memiliki hambatan dalam melakukan pembayaran.

#### 5. Upaya pengawasan pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dilakukan PT BPRS Amanah Sejahtera GKB Gresik-Jawa Timur dalam menekan terjadinya tunggakan kredit.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya tunggakan pembiayaan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat diminimalisir dengan berbagai macam upaya penyelamatan tunggakan pembiayaan. Berikut adalah upaya yang dilakukan PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur:

##### a. Faktor Internal

Memilih seseorang yang menjadi *Account Officer* haruslah memiliki kemampuan untuk memahami berbagai macam masalah yang ada dan keterampilan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Seorang *AO* juga perlu diberikan pelatihan karena tidak hanya memiliki kemampuan dan keterampilan, tetapi seorang *AO* harus mampu memberikan solusi.

- 1) Melakukan penyitaan terhadap agunan yang merupakan tindakan terakhir yang diambil oleh bank jika nasabah tidak memiliki itikad baik atau sudah tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya.
- 2) Melakukan upaya *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) yaitu Suatu tindakan yang diambil dengan cara melakukan perubahan pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu pembayaran kredit.

- 3) Melakukan upaya *Restructuring* (Penataan Kembali) yaitu tindakan yang diambil oleh bank kepada nasabah dengan menambah jumlah pembiayaan sebagai modal nasabah dengan pertimbangan apakah nasabah akan membutuhkan tambahan dana atau tidak dan apakah usaha yang dibiayai masih layak atau tidak.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- a. Implementasi pengawasan kredit usaha kecil dan menengah dalam upaya menekan tunggakan kredit pada PT BPRS Amanah Sejahtera GKB Gresik-Jawa Timur belum cukup baik karena terdapat langkah yang belum diterapkan. Dapat dilihat dari pengawasan fisik rutin (*inspeksi On The Spot*) yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah yang tidak dilakukan secara rutin atau berkala melainkan hanya dilakukan pada saat nasabah mengalami penunggakan, *monitoring* perkreditan yang hanya melakukan penarikan atas laporan diawal mengenai perkembangan usaha beberapa bulan sebelum adanya pembiayaan, dan adanya kesalahan *Account Officer* dalam menganalisis besar jumlah *plafond* yang akan diberikan.
- b. Upaya pengawasan kredit usaha kecil dan menengah agar dapat menekan adanya tunggakan kredit pada PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur melihat dari beberapa faktor terjadinya tunggakan pembiayaan. Faktor internal yaitu pada pihak bank yang kurang teliti sehingga mengalami kesalahan dalam menganalisis besar jumlah *plafond* yang akan diberikan sehingga menyebabkan ketidakakuratan, dan faktor eksternal yaitu watak dari nasabah yang dirasa kurang baik, adanya penurunan usaha nasabah, serta adanya musibah yang dialami oleh pihak nasabah seperti kebakaran atau bencana alam. Tindakan penyitaan terhadap agunan, *rescheduling* (Penjadwalan Kembali), *restructuring* (Penataan Kembali) sebagai upaya menekan tunggakan pembiayaan.

### 2. Saran

Berdasarkan dari uraian kesimpulan di atas peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat membantu peningkatan perkembangan dan kemajuan PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur antara lain:

- a. Perlu adanya pengawasan yang diperketat mengenai, pengawasan fisik rutin (*inspeksi On The Spot*) yang dijadwalkan baik seminggu sekali atau beberapa bulan sekali secara berkala yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah sehingga dapat melakukan pemantauan perkembangan usaha nasabah dan diharapkan dapat meminimalisir adanya tunggakan, melaksanakan *monitoring* perkreditan dengan melihat laporan keuangan debitur setiap bulannya guna menilai kondisi usaha nasabah, perlu adanya pelatihan atas kemampuan dan ketelitian yang dimiliki oleh *Account Officer* sehingga kesalahan dalam menganalisis dapat dihindari.
- b. Implementasi pengawasan Pembiayaan pada PT BPRS Amanah Sejahtera GKB, Gresik-Jawa Timur perlu melaksanakan pengawasan dengan teliti secara keseluruhan mulai dari melihat watak nasabah hingga kondisi usaha yang diharapkan dapat melakukan pelunasan terhadap pengajuan pembiayaan yang dilakukan, serta melakukan tindakan penyelamatan yang baik mulai dari penyitaan terhadap jagunan, *rescheduling* (penjadwalan kembali), *restructuring* (penataan kembali) sebagai upaya menekan tunggakan pembiayaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa, Adi dan Edia Handiman. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks.
- Firdaus, M. Aziz. 2012. *Metode Penelitian*. Edisi Pertama. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Arianti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Kasmir, 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Edisi Revisi 8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Cetakan Ketujuh. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Syarifuddin, Amir. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Umam, Khotibul. 2009. *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah*. Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA.
- Wardiah, Mia Lasmi. 2013. *Dasar-dasar Perbankan*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Wibowo, Edy dan Untung Hendy Widoko. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Bogor: Ghalia Indonesia.